



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Penerapan Inklusi Pajak Pada Perguruan Tinggi Swasta

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Setiadi
setiadi@unsurya.ac.id

Abstract

Low tax awareness results in low tax revenues. For this reason it is very necessary to increase citizen awareness about the importance of understanding taxes. Tax knowledge can be obtained from two aspects namely through general or lazim education received related to mulut sungai particular teka-teki and knowledge specifically aimed at the possibility of tax evasion opportunities. Fulfillment of tax courses in each curriculum is the latest requirement in compiling tax SLPs including the establishment of Tax Centers in every private university.

Keywords: *taxation, knowledge state revenue, curriculum.*

Abstrak

Rendahnya rekognisi tambangan bercerai terhadap rendahnya keikhlasan tambangan . Untuk itu sangat diperlukan adanya pertambahan rekognisi anggota rat mengenai pentingnya pengertian tambangan. Pengetahuan tambangan bisa ada mulai sejak dua sebelah yaitu memintasi kursus masyarakat atau lazim yang dikabulkan tercantol pakai hal terbatas dan pengandaian yang secara terasing ditujukan dekat kans terhadap keleluasaan kepada menjauhi tambangan . Pemenuhan netra pidato perpajakan di setiap kurikulum berperan kehendak terkini bagian dalam beberes RPS perpajakan terhitung penyusunan Tax Center di setiap sekolah tinggi tinggi swasta.

Kata Kunci : perpajakan, penerimaan negara, kurikulum.



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

I. PENDAHULUAN

Rendahnya rekognisi tambangan bercerai terhadap rendahnya keikhlasan tambangan . Untuk itu sangat diperlukan adanya pertambahan rekognisi anggota rat mengenai pentingnya pengertian tambangan . Pemahaman terhadap tambangan kehalusan keharusan tambangan tempuh rekognisi tambangan yang tunduk diharapkan bisa memperkuat keikhlasan rat mulai sejak tambangan . Berbagai ikhtiar teka dilakukan oleh kekuasaan tertinggi diantaranya pakai memitar dekat pengikut serupa kandidat keharusan tambangan potensial. Karenanya kekuasaan tertinggi memintasi Direktorat Jenderal Pajak DJP berproses serupa pakai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan introduksi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi secara sifat teka membuka kalender inklusi depan tambangan . Kepatuhan keharusan tambangan akan merayap sejurusan pakai pertambahan rekognisi tambangan . Voluntary compliance menyimpan kontribusi penting bagian dalam self assessment system SAS . Peningkatan kepatuhan melalui direct enforcement lebih dekat penegakan memintasi law enforcement pakai menimbang-nimbang penentuan dan pengenaan pampasan . Hal ini didasarkan dekat fikrah bahwa keharusan tambangan semata-mata akan berperan berkorban jika kedapatan klaim Whait 2014 Allingham Sandmo 1972 Slemrod 2019. Penerapan SAS mengerasi keharusan tambangan memegang pengandaian yang tunduk mengenai perkara perpajakan. Tanggung sambut sepenuhnya terdapat dekat keharusan tambangan. Rendahnya pengertian perkara tambangan dan rekognisi sipil keharusan tambangan menjadikan alasan rendahnya moral sipil menunaikan tambangan Mohd Rizal Palil 2011 Hassan Nawawi Salin 2016 Newman Nokhu 2018 Igbeng Tapang Usang 2012 Olaoye Ayeni agbaje Alaran ajewole 2017. Selain itu rendahnya moral keharusan tambangan dipengaruhi oleh kehalusan keharusan tambangan Rodriguez Justicia Theilen 2018 Stead Orozco 2019 . Pentingnya pengertian tambangan khususnya bagian dalam mematok gerakan keharusan tambangan teka ternyata bagian dalam beberapa analisis terhadap tutur cakap moral . Pengetahuan tambangan bisa ada mulai sejak dua sebelah yaitu memintasi kursus masyarakat atau lazim yang dikabulkan tercantol pakai hal



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

terbatas dan pengandaian yang secara terasing ditujukan dekat kans terhadap keleluasaan kepada menjauhi tambangan. Penelitian sebelumnya teka mengetahui bahwa pengandaian tambangan masyarakat memegang pertalian yang sangat erat pakai talenta keharusan tambangan kepada mengindra kebiasaan dan perkara perpajakan tempuh talenta berjuang kepada mematumahnya. Eriksen dan Fallan 1996 menumpahkan bahwa resam yang tercapai kepada menutupi kebohongan tambangan adalah pakai menerimakan pengandaian tambangan yang lebih tunduk menjelang putaran sipil yang lebih draf kepada memperkuat akhlak perpajakan dan ide sipil mengenai pengertian perkara perpajakan. Hal ini akan berperan kelakuan ke jurus yang lebih tunduk kepada menggerakkan ungkapan bagian dalam kebiasaan tambangan dan pengandaian tambangan berperan segmen keharusan mulai sejak ungkapan kejuruan sosial di sekolah sekolah Mohd Rizal Palil 2011. Pengetahuan keharusan tambangan sangat mencengkam gerakan keharusan tambangan terhadap pengertian bagian dalam perkara perpajakan. Semakin berlebihan petunjuk yang dimiliki keharusan tambangan dan pengertian sipil mengenai nilai tambangan cerita keharusan tambangan akan semakin berkorban melakukan barang bawaan perpajakannya Asrinanda 2018 . Kesadaran keharusan tambangan menjadikan ajakan kepada menimbang-nimbang eigendom dan barang bawaan perpajakan sepikiran pakai perkara perundang undangan. Rendahnya rekognisi keharusan tambangan bisa disebabkan oleh minimnya pengandaian dan pengertian mengenai perkara perpajakan Yayuk Margono Eka Sudjatno 2017. Kesadaran tambangan akan memperkuat moral keharusan tambangan. Wajib tambangan yang depan pangkal eigendom dan kewajibannya akan memegang stadium moral yang tinggi. Moral tambangan menjadikan pretensi intrinsik kepada menunaikan tambangan Horodnic 2018 . Moral tambangan serupa kesatuan pretensi non pura dan konstituen konstituen kepada moral tambangan yang bersemayam di bagian luar maksimalisasi makna yang diharapkan Luttmer Singhal 2014 . Hasil analisis yang menyambungkan kehalusan keharusan tambangan pakai moral keharusan tambangan menyinggiri adanya pertalian negatif jarak kehalusan tambangan dan moral tambangan yaitu semakin tinggi pretensi intrinsik kepada menunaikan tambangan semakin tinggi moral tambangan Purnamasari Sudaryo 2018 Martinez Coelho 2019 Igbeng et al. 2012 . Hubungan jarak kursus dan kehalusan tambangan teka dibahas oleh Torgler 2007 . Dalam analisis empiris mengenai kehalusan



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

tambangan kursus teka digunakan serupa keunggulan sosial ekonomi. Penelitian yang menyambungkan kehalusan tambangan dan kursus menyatukan disparitas sambungan . Banyak analisis tidak bisa menyatukan imbalan yang berarti mulai sejak kursus dekat kehalusan tambangan dan tempo hasilnya berarti hubungannya berbagai rupa seringkali tidak kuat dugaan secara spesifikasi Rodriguez Justicia Theilen 2018 . Yayasan Adi Upaya serupa pohon mulai sejak Perguruan Tinggi swasta di sisi belakang pemodernan TNI AU serupa maksiat esa sekolah tinggi tinggi yang diharapkan terlibat mensukseskan kalender inklusi tambangan yaitu kalender dimana seluruh tubuh kalender penyelidikan memegang MATA KULIAH PERPAJAKAN dekat KURIKULUM kelar pakai RPS dan EVALUASI nya. Keikut turutan PTS bagian dalam kalender inklusi tambangan tetap sangat diperlukan bagian dalam rancangan terlibat membantu Bangsa dan Negara memintasi PAJAK. Program ini diharapkan bisa memperkuat rekognisi pengikut mengenai pentingnya tambangan . Mahasiswa menyimpan kontribusian penting karena pengikut akan dan teka berperan keharusan tambangan potensial yang terjun tempuh bagian dalam mensukseskan restorasi nasional.

II. PEMBAHASAN

Pengetahuan Pajak Tax Knowledge Salah esa konstituen penting yang mencengkam moral keharusan tambangan adalah pengandaian perpajakan. Tidak memesonakan bahwa mayoritas keharusan tambangan tidak terlalu mengindra pedoman perpajakan pakai tepat sehingga keharusan tambangan seringkali menuduh bahwa keharusan tambangan tidak memegang pengandaian yang tunduk mengenai tambangan dan memandang tidak kompeten pangkal hal perpajakan. Sejumlah realitas empiris menyinggirkan bahwa pengandaian yang perbanyak tunduk mengenai perkara perpajakan akan mengusulkan ketidakpercayaan menjelang fiskus Hofmann Hoelzl Kirchler 2012 . SAS mengikat keharusan tambangan memegang pengandaian yang cukup mengenai pedoman dan strategi perpajakan. SAS akan menjagokan keharusan tambangan secara adil sepikiran pakai keadaan yang dihadapi Aondo 2019 . Penelitian yang membicarakan konstituen batasan moral dan kehalusan tambangan selesai berlebihan dilaksanakan namun belum kedapatan yang secara komprehensif berfokus dekat kontribusian kursus bagian dalam menyesuaikan kehalusan dan



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

rekognisi tambangan . Hubungan kursus dan moral tambangan teka dibahas oleh Lewis 1982 yang menyatukan pertalian klise jarak kursus dan moral tambangan . Wajib tambangan yang bertata cara lebih tunduk dan mampu mengindra pedoman perpajakan suka benar akan mengungsi mulai sejak ganjaran tambangan Rodriguez Justicia Theilen 2018 . Hasil yang langka menyinggir bahwa terselip pertalian negatif jarak stadium pengandaian dan moral keharusan tambangan Sugiartini Hardika Aryaningsih 2020 Mukhlis Soesetio 2015 . Temuan ini sejurusan pakai temuan Adesina et al 2016 bahwa pengandaian perpajakan beruang negatif berarti terhadap moral tambangan Eric Solomon Nicholas 2019 . Hasil ini juga sejurusan pakai sambungan analisis Bernard Memba Oluoch 2017 yang menumpahkan bahwa pengandaian dan rekognisi tambangan memegang pertalian negatif dan berarti pakai moral tambangan Bernard Memba Oluoch 2017.

Moral Pajak Tax Morale Moral tambangan dimaksudkan serupa pretensi intrinsik bilang keharusan tambangan kepada menunaikan tambangan Igbeng et al. 2012 . Kornhauser 2007 meluaskan prinsip dan coret-coretan mengenai kehalusan tambangan . Kornhauser memikirkan analisis kehalusan tambangan bagian dalam tiga tempat formal jalan kognitif dan afektif nilai sosial dan nilai nilai torso dan konstituen demografis Horodnic 2018. Studi sebelumnya menyinggir bahwa terselip orang yang disebut serupa pelunas tambangan jujur Cummings Martinez Vazquez McKee Torgler 2009 . Penghindar tambangan dekat umumnya memegang kehalusan tambangan rendah dan bergerak serupa orang rasional yang memisalkan jarak nilai menjauhi tambangan pakai nilai moral Luttmmer Singhal 2014. Moral tambangan yang tinggi diperlukan mulai sejak keharusan tambangan kepada bisa menjemput stadium moral tambangan yang tinggi. Beberapa analisis menyinggir bahwa terselip imbalan kehalusan keharusan tambangan terhadap moral keharusan tambangan Williams Krasniqi 2017 Andini Rahmiati 2020 Pertiwi 2017 Hardika Wicaksana Subratha 2021. Tiga konstituen artikulasi penting bagian dalam mengindra kehalusan tambangan hukum dan kasam kehalusan pengertian dan pertalian jarak pelunas tambangan dan kekuasaan tertinggi. Aturan dan kasam kehalusan berfokus dekat nilai nilai sosial dan menggosipkan empat kasam kesimpulan divergen canggung kantor dan pengertian . Pernyataan yang maksiat akan melahirkan bahaya kesimpulan divergen atau jika terkejar cemoooh dan pakai demikian syak terhadap khayalan jasad keharusan tambangan . Jika perkara perpajakan



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

dirasakan tidak adil oleh keharusan tambangan cerita keharusan tambangan menikmati pikulan tambangan yang tinggi kehalusan kepada bersifat jujur akan memendek dan penghindaran tambangan bisa dilihat serupa figur persabungan terhadap perkara tambangan. Sistem tambangan yang tidak adil bisa memperkuat rangsangan kepada merasionalisasi kelancungan oleh pelunas tambangan.

Berdasarkan prinsip ekuitas bisa dikatakan bahwa keharusan tambangan mempersepsikan pertalian berjuang pakai rat tidak semata-mata serupa pertalian klaim tetapi juga serupa maksiat esa pertukaran. Wajib tambangan suka benar kepada menunaikan atau berkorban jika tambangan yang dibayarkan sederajat pakai kemudahan yang disediakan oleh kekuasaan tertinggi . Interaksi jarak keharusan tambangan dan kekuasaan tertinggi juga menjadikan konstituen batasan karena manuver negatif oleh rat dimaksudkan kepada memperkuat gerakan dan traktat negatif keharusan tambangan tidak semata-mata terhadap perkara perpajakan tetapi juga terhadap ganjaran tambangan pakai demikian memperkuat moral keharusan tambangan Chucks 2013. Ada tiga tingkatan mulai sejak besaran enam taraf bagian dalam Kohlberg s theory of kehalusan development. Ketiga stadium ini menilik jajaran yang stabil tetapi secara kualitatif sepikiran pakai berbagai ragam bicara kehalusan . Motivasi perdana dan yang formal mulai sejak stadium perdana pre conventional morality mencengap dua taraf perdana hukum dan keyakinan dan kurnia orang adalah kepada menjauhi keyakinan dan menjemput hobi torso. Individu bagian dalam taraf ini akan bergerak secara egois. Tahap kedua kerabat tercantum menangkap bahwa dia bisa memperlainkan keinginannya pribadi mulai sejak gairah kerabat lain dan teladan otoritas. Pada stadium kedua conventional morality melingkupi taraf ketiga dan keempat interpersonal dan otoritas. Individu memegang pretensi yang bertalian pakai pertalian besi balasan dan harapan. Motivasi formal orang dekat stadium ini adalah kepada dikabulkan secara sosial oleh kerabat lain. Pada stadium buncit the post conventional morality individu meluaskan ide kehalusan yang berhak temporer bagian dalam estimasi kehalusan dia kencang menyasar dekat semberap masukan universal sebagai pengertian dan kejujuran. Tahap ini sepikiran pakai semberap masukan kehalusan universal yang harus diikuti semua kerabat mengikuti Kohlberg dan keunggulan kehalusan ditandai pakai menjemput taraf ini. Superioritas kehalusan normatif yang harus dicapai



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

oleh jiwa rasional sebagai bagian dalam imperatif spesifik Kant serupa sambungan bicara kognitif adalah kesimpulan pengertian universal. Individu dekat taraf ini memeriksa kultur serupa korban bukan serupa sarana. Konstruksi pangkal konkordansi yang digunakan bagian dalam analisis ini menysasar dekat pasal Torgler 2007 yang juga dijadikan model oleh Mc Kerchar et al. 2013 yaitu bahwa terselip tiga konstituen formal yang penting bagian dalam mengindra tax morale 1 hukum kehalusan 2 pengetahuan mengenai pengertian bagian dalam perkara tambangan dan 3 stadium akidah terhadap etika kekuasaan tertinggi Williams Krasniqi 2017. Selain Kohlberg s theory of kehalusan development Zhang Zhao 2017 terselip tiga prinsip yang bisa digunakan kepada kepada mencatat korelasi kehalusan tambangan dan moral tambangan . Ketiga prinsip yang digunakan kepada mencatat pertalian kehalusan tambangan dan moral tambangan adalah Intrinsic Motivation Theory Ipsative Theory dan Theory of Crime Chucks 2013. Inklusi Pajak Kurangnya pengertian yang tunduk peri perpajakan menjadikan maksiat esa konstituen penyekat kurangnya rekognisi sipil bagian dalam ihwal kepatuhannya serupa keharusan tambangan Anggaraeni Septian Kristanto 2019.

Menyadari ihwal tercantum Direktorat Jenderal Pajak melantas mengerjakan sosialisasi kampanye depan tambangan manfaat memperkuat pengandaian tempuh rekognisi perpajakan keharusan tambangan maksiat satunya pakai memintasi kalender inklusi rekognisi tambangan . Instansi negara tidak semata-mata mengerjakan sosialisasi depan tambangan pakai terperosok ke kawasan bertatap depan terus pakai keharusan tambangan tetapi waktu ini juga mencari jalan mengedukasi secara miring bertingkah laku pakai resam menganjurkan memintasi corong elektronik tunduk itu akun sosial corong televisi maupun radio. Program inklusi rekognisi tambangan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berproses serupa pakai alat negara di tempat kursus bagian dalam rancangan menyuntikkan dan memperkuat perpaduan rekognisi tambangan sejak pagi-pagi memintasi kurikulum kursus.

Program inklusi tambangan tidak semata-mata memitar sekolah tinggi tinggi tetapi juga kursus menengah SMA dan perdana SMP . Dalam kurikulum kursus akan dimasukkan pelajaran yang menggosipkan tambangan terhitung di dalamnya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tambangan persepsi tambangan penggunaan tambangan eigendom dan barang bawaan



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

sipil tempuh bahara serupa anggota rat bagian dalam restorasi . Kerjasama ini dituangkan bagian dalam MoU 4 MK.03 2016 terpacul 28 Maret 2016 jarak DJP pakai Kemenristek Dikti. Sejalan pakai ihwal tercantum keterkaitan sekolah tinggi tinggi hukum kursus sangat diharapkan bisa memperkuat rekognisi tambangan. Permasalahannya apakah presensi kalender inklusi tambangan ini memang diperlukan bagian dalam ikhtiar pertambahan pengertian dan rekognisi tambangan ihwal ini wajib dicari jawabannya. Program inklusi rekognisi tambangan bagian dalam kursus dan Perpres no. 87 2017 mengenai Penguatan Pendidikan Karakte. Program inklusi tambangan serupa konstituen pendorong mediasi yang bisa memperkuat pengertian dan rekognisi tambangan. Edukasi tambangan menjelang pengikut dan pelatih bisa dilakukan memintasi kalender inklusi tambangan.

Output mulai sejak kalender inklusi tambangan adalah gerakan pengandaian dan ketrampilan akan tambangan bagian dalam kurikulum kursus . Muatan pelajaran yang dimasukkan bagian dalam inklusi tambangan adalah barang bawaan memasang jasad barang bawaan mengitung tambangan terutang barang bawaan ganjaran mengganti tambangan dan barang bawaan memberitakan tambangan . Teori Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran keharusan tambangan adalah ikhtiar atau manuver yang disertai pakai ajakan jasad dan reka kepada menimbang-nimbang eigendom dan barang bawaan perpajakan sepikiran pakai perkara perundang undangan. Kesadaran keharusan tambangan dipahami jika perkara perpajakan teka tersua diakui dihormati dan dipatuhi. Jika pengertian pangkal perkara perpajakan masih tertampung cerita rekognisi keharusan tambangan akan rendah. Rendahnya rekognisi keharusan tambangan diduga disebabkan oleh minimnya pengandaian dan pengertian mengenai perkara perpajakan. Nugroho dan Zulaikha 2012 memeriksa konstituen konstituen yang mencengkam nafsu pretensi menunaikan tambangan pakai rekognisi menunaikan tambangan serupa sebab intervening.

Hasil analisis menyinggir bahwa sebab pengandaian dan pengertian perkara perpajakan nilai dana perpajakan dan pengetahuan keefisienan perpajakan beruang berarti terhadap rekognisi menunaikan tambangan . Munari 2005 juga mencatat bahwa keharusan tambangan akan depan tambangan jika berjuang mengindra pedoman dan doktrin perpajakan memaklumi maslahat ganjaran tambangan menjelang rat mengindra eigendom dan barang bawaan yang harus



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

dilaksanakan menghisab menunaikan dan memberitakan secara sukarela menghisab menunaikan dan memberitakan tambangan pakai tepat . Indikator rekognisi keharusan tambangan diukur pakai memaklumi maslahat perpajakan mengindra eigendom dan barang bawaan keharusan tambangan mampu menghisab tambangan mampu menunaikan tambangan dan mampu memberitakan tambangan Yayuk et al. 2017.

Kesadaran sipil kepada berkorban terhadap tambangan berperan memendek disebabkan oleh sejumlah konstituen Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada DJP Pemahaman Yang Kurang Akan Pajak Pajak Belum Menjadi Budaya Sulitnya Melakukan Pelaporan dan Ketidaktaatan Masyarakat Terhadap Undang Undang UU Perpajakan Anggaraeni et al. 2019 . Secara teoritis moral keharusan tambangan bisa dipengaruhi oleh sebab sebagai pengandaian dan pengertian mengenai perkara perpajakan dan rekognisi keharusan tambangan. Kepatuhan tambangan dipengaruhi oleh bibit pengandaian perkara tambangan tempuh eigendom dan barang bawaan keharusan tambangan. Kepatuhan keharusan tambangan bisa ditingkatkan memintasi rekognisi tambangan.

Faktor konstituen yang mencengkam rekognisi keharusan tambangan dijelaskan mengabdikan Theory of Planned Behavior TPB yang dikembangkan oleh Ajzen. TPB mencatat bahwa tutur cakap moral dijelaskan secara berarti memintasi sebab gerakan nilai subjektif dan keunggulan tutur cakap yang beradu terhadap tutur cakap ketidakpatuhan. Hasil yang langka tapak bagian dalam analisis Widayati dan Nurlis 2010 di mana sebab pengandaian dan pengertian tambangan mencengkam moral . Namun sambungan ini tidak sepikiran pakai bahwa mulai sejak pengembara lain yang menyatukan negatif pertalian bagian dalam analisis berjuang karena keharusan tambangan yang selesai memahami perpajakan bergiat bahwa lebih tunduk menunaikan tambangan daripada berhasil pampasan tambangan Yayuk et al. 2017 .

III. DASAR HUKUM

Dalam pemenuhan kurikulum mata kuliah Perpajakan dan penyusunan RPS Perpajakan maka dapat didasari oleh landasan hukum, sebagai berikut :



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

- a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 2025.
- b) Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP-33/SJ/2015 tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP-382/SJ/2015.
- c) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 - 2019.
- d) Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan.
- e) Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- f) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Untuk mendalami Program Inklusi Pajak ini, diharapkan setiap fakultas di bawah PTS . menyesuaikan kurikulum dengan memasukkan Mata Kuliah dengan RPS lengkap terkait Hukum dan perhitungan Perpajakan. Data dan/atau informasi terkait Inklus Pajak bisa diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data utama berasal dari regulasi, Nota Kesepahaman (MoU), dan publikasi resmi humas DJP. Regulasi dan MoU yang digunakan meliputi Surat



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-52/PJ/2016 tentang Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan, PER-12/PJ/2021 tentang Edukasi Perpajakan, MoU-21/MK.03/2014 dan Nomor 13/X/NK/2014 tentang Peningkatan Kesadaran Perpajakan Melalui Pendidikan, serta MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Publikasi resmi humas DJP diperoleh melalui laman <https://p2humas.intranet.pajak.go.id> (internal) dan <https://edukasi.pajak.go.id/> (eksternal). Kedua laman tersebut adalah saluran/media komunikasi DJP tentang inklusi kesadaran pajak kepada para *stakeholdernya*. Laman internal diperuntukkan khusus bagi para pegawai DJP. Baik pegawai yang mengemban tugas sebagai agen Inklusi Pajak untuk bahan ajar ataupun bagi seluruh pegawai DJP untuk informasi umum khususnya bagi mahasiswa sebagai calon wajib pajak yang memiliki penghasilan.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana program Inklusi pajak sebagai strategi memberikan pemahaman bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai calon wajib pajak penghasilan pribadi sehingga meningkatkan inklusi kesadaran pajak dan kepatuhan pembayaran pajak maka setiap Universitas atau Sekolah tinggi diharapkan memiliki program KURIKULUM dengan memasukkan MATA KULIAH sebagai bagian dari Mata Kuliah Umum dari fakultas yang ada sehingga setiap PTS dibawah . nantinya seluruhnya memiliki TAX CENTER seperti TAX Center di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma sebagai bagian dari kontribusi Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan landasan hukum yang telah disebut kan sebelumnya.

Langkah – Langkah Bersama dalam pemenuhan inklusi pajak di PTS bisa dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menghubungi KANWIL DJP setempat
2. Melakukan MOU dengan KANWIL DJP serta membentuk TAX CENTER dengan dikelola oleh Universitas
3. Melakukan penyamaan persepsi terkait kurikulum dengan menambah mata kuliah PERPAJAKAN pada prodi dan fakultas PTS.



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

4. Membentuk tim relawan pajak bersumber dari mahasiswa untuk kelancaran kegiatan Tax Center sebagai bagian ikut serta membangun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia

MARI BERSAMA KITA TAAT PAJAK, PEDULI PAJAK DAN SADAR PAJAK dari sejak dini Bersama Mahasiswa sebagai generasi muda yang PAHAM DAN PANDAI menghitung, melapor dan menyetor pajak untuk kepentingan BANGSA dan NEGARA INDONESIA.

IV. PENUTUP

1. Inklusi Pajak dalam Perguruan Tinggi sangat penting menjadi bagian dari partisipasi Perguruan Tinggi khususnya PTS dibawah pembinaan Yayasan Adi Upaya dalam memberikan pengetahuan umum dan khusus kepada setiap calon wajib pajak atau mahasiswa dari berbagai fakultas. Inklusi Pajak perlu diterapkan sesegera mungkin dengan menyesuaikan kurikulum sebagai bagian dari nilai tambah proses akreditasi perguruan tinggi sesuai dengan dasar hukum yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Perlunya pembentukan Tax Center di setiap perguruan tinggi swasta di bawah . juga bisa menjadi pertimbangan karena adanya perintah dan arahan KEMENKEU RI sebagai bagian dari perintah PRESIDEN RI dalam memenuhi penerimaan negara yang mandiri dan perguruan tinggi menjadi salah satu media dalam membantu meningkatkan pemahaman PERPAJAKAN INDONESIA

V. DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion : A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Andini, M., & Rahmiati, A. (2020). Tax Moral and Compliance of Individual Taxpayer. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 10(15), 426–437. Retrieved from [http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct\(34\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct(34))



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Anggaraeni, V., Septian, D., & Kristanto, B. (2019). Evaluasi Keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 91–97. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Aondo, R. M. (2019). Effectiveness of Taxpayer Education on Tax Compliance for Small and Medium Enterprises in Kenya : A Study of Selected Business Enterprises in Kitengela Town in Kajiado County. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 1(3), 114–123.

Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>

Bernard, O. M., Memba, F. S., & Oluoch, O. (2017). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, Volume 06(10), 728–733.

Chucks, A. D. (2013). Tax Morale and Its Effect on Taxpayers’ Compliance to Tax Policies of the Nigerian Government. *IOSR Journal of Business and Management*, 12(6), 35–55. <https://doi.org/10.9790/487x-1263555>

Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>

Eric, A., Solomon, A., & Nicholas, A. K. (2019). *An Empirical Assessment of Tax Knowledge , Socio-Economic Characteristics and Their Effects on Tax Compliance Behaviour in Sunyani Municipality , Ghana Corresponding Author : Amankwaah Eric*. 10(4), 148–153.

Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>

Hardika, Nyoman Sentosa., Harini, Ni Luh Putu Wiswa., Mandia, I Nyoman. (2021). INKLUSI PAJAK DAN MORAL PAJAK DI PERGURUAN TINGGI. *ISAS Publishing, Politeknik Negeri Ambon* 26 – 28 Oktober 2021, 65 – 75

Hassan, N., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). Improving Tax Compliance via Tax Education - Malaysian Experience. *Malaysian Accounting Review*, 15 (2)(December 2016), 243–262.

Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2012). Europe PMC Funders Group Preconditions of Voluntary Tax Compliance : Knowledge and Evaluation of Taxation , Norms , Fairness , and Motivation to Cooperate. *Z Psychol.*, 216(4), 209–217. <https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209>.Preconditions

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014

Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (Central Transformation Office) Nomor KEP-33/SJ/2015

Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>

Zhang, Q., & Zhao, H. (2017). An Analytical Overview of Kohlberg’s Theory of Moral Development in College Moral Education in Mainland China. *Open Journal of Social Sciences*, 05(08), 151– 160. <https://doi.org/10.4236/jss.2017.58012>